

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ditentukan bahwa: *“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”*

Dari ketentuan ini jelaslah bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat dan disertai dengan tantangan yang semakin luas dan berat, perlu selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan demikian perbankan nasional perlu diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua

lapisan masyarakat maupun perbankan perkreditan rakyat yang pelayanannya diperuntukkan bagi golongan ekonomi atau pengusaha kecil.<sup>1</sup>

Masyarakat perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraannya. Dalam kenyataannya tidak semua masyarakat terutama masyarakat lapisan menengah ke bawah memiliki modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktifitasnya, sehingga dalam hal ini masyarakat lapisan menengah ke bawah tersebut membutuhkan bantuan yang berupa pinjaman atau kredit yang bisa mereka cari, salah satunya di suatu lembaga perbankan.

Kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun badan usaha. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang strategis bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari fungsi utama yang dimiliki oleh bank yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dari fungsi utama bank tersebut, bank bisa dikatakan sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara orang yang memiliki uang dan yang membutuhkan uang.

Dengan adanya minat orang yang memiliki kelebihan uang untuk menyimpan uangnya di bank, maka bank akan bisa mengumpulkan uang atau menghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian dana-dana itu akan disalurkan lagi ke masyarakat lainnya yang membutuhkannya dalam bentuk

---

<sup>1</sup>Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hal .7

kredit. Penghimpunan dana merupakan suatu jasa utama yang ditawarkan di dunia perbankan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat.<sup>2</sup>

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan.

Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti kemajuan aneka ekonomi baik pasar domestik maupun pasar global, sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga semakin bertambah dan beraneka warna. Perkembangan ini tentu saja mengandung kemungkinan pertambahan resiko yang akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Apabila dahulu perbankan dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kebiasaan praktek yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tak tertulis, maka dengan semakin kompleks dan semakin tingginya resiko yang dihadapi, praktek perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modern pula.

Penyediaan kredit bank-bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas Bank Indonesia, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat.<sup>3</sup> Berjalannya kegiatan

---

<sup>2</sup>Ibid, Hal. 221.

<sup>3</sup>Thomas Suyatno, dkk., 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 3

perkreditan akan lancar apabila adanya suatu sikap saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral.<sup>4</sup>

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama, sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan yang paling besar dibanding dengan Pendapatan Dasar (*Fee Base Income*). Berbeda dengan bank-bank yang ada di negara-negara maju, laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga dibanding dengan pendapatan jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang.<sup>5</sup>

Perbankan juga berperan dalam pembangunan ekonomi yaitu mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola

---

<sup>4</sup>Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 366

<sup>5</sup>Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 5

dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha-usaha yang dijalankan oleh golongan-golongan ekonomi menengah kebawah. Maka dari itu, UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.<sup>6</sup>

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I. Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.

---

<sup>6</sup>[Http://www.siap-bos.blogspot.com](http://www.siap-bos.blogspot.com). Diunduh pada tanggal 2 Maret 2011 pukul. 20.00 WIB.

Tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MAJENANG CABANG SRAGEN”**

## **B. PEMBATASAN MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH**

### **1. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk mempertegas ruang lingkup dari penelitian tersebut, sehingga

didalam penulisan skripsi tidak menyimpang jauh baik dalam pengamatan maupun pembahasannya. Dengan begitu dalam penelitian diharapkan dapat memberikan hasil serta kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian. Maka dari itu, penulis melakukan pembatasan pada pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Majenang cabang Sragen.

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Majenang Cabang Sragen dan bagaimana upaya yang dilakukan BRI Unit Majenang dalam mengatasinya?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan kredit macet antara pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Majenang dengan pihak penjamin yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

#### **1. Tujuan Objektif**

- a. Untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Majenang Cabang Sragen.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan apa saja yang timbul dari pemberian Kredit Usaha Rakyat serta tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia unit Majenang Cabang Sragen dalam mengatasinya.

#### **2. Tujuan Subyektif**

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.



## 2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
- c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.

#### **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Di Indonesia ketentuan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Diantara beberapa usaha yang dilakukan oleh bank adalah kredit. Kredit merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan. Dalam Undang-undang Perbankan, pengaturan mengenai kredit diatur dalam Pasal 6 mengenai usaha bank dan Pasal 2 yang menyebutkan bahwa usaha bank harus berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Dalam perjalanannya penyaluran kredit terbagi menjadi dua, yaitu kredit secara umum dan kredit usaha rakyat (KUR). Kredit umum merupakan salah satu fasilitas kredit dengan tetap menggunakan jaminan bagi debitur dan pelaksanaannya. KUR adalah program kredit yang digagas pemerintah dan dikeluarkan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikan melalui suatu program fasilitas kredit yang disediakan oleh bank-bank yang secara langsung ditunjuk oleh pemerintah.

KUR adalah kredit program yang digagas oleh pemerintah. Konsep dasar KUR ini adalah kredit perbankan yang dijamin pemerintah. Untuk melaksanakan penjaminan KUR, pemerintah menunjuk BUMN penjamin yaitu Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Namun, besarnya jaminan yang diberikan pemerintah tidaklah utuh 100% dari nilai KUR melainkan hanya 70%, sedangkan sisanya 30% menjadi resiko bank pelaksana.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengetahui pemasalahan hukum apa yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit dan bagaimana penyelesaiannya, serta untuk mengetahui penyelesaian kredit macet antara pihak bank dengan pihak penjamin.

## **E. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar, serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data, serta menganalisanya.

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan dan menguraikan tentang permasalahan hukum yang timbul dari pemberian kredit dan upaya bank dalam mengatasinya, serta penyelesaian kredit macet oleh PT. Askrindo.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Majenang Cabang Sragen yang beralamat di Kecamatan Sukodono. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Majenang melayani adanya fasilitas Kredit

Usaha Rakyat tanpa jaminan dengan lokasi strategis dan berdekatan dengan beberapa UMKM yang menjadi sasaran KUR.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif karena bermaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang timbul dari pemberian kredit dan upaya bank dalam mengatasinya, serta penyelesaian kredit macet oleh PT. Askrido.

### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Majenang Cabang Sragen, yaitu Kepala BRI Unit Majenang Cabang Sragen dan Mantri/AO BRI Unit Majenang Cabang Sragen, serta bagian klaim PT. Asuransi Kredit Indonesia.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup lembar permohonan kredit usaha rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Majenang Cabang Sragen, literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana penulis memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan pejabat BRI Unit Majenang Cabang Sragen, serta bagian klaim PT. Asuransi Kredit Indonesia Semarang.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas lembar permohonan kredit usaha rakyat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di BRI Unit Majenang

Sragen dan bagian klaim PT Askrindo Semarang. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.<sup>7</sup>

b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Majenang Cabang Sragen, serta PT. Askrindo Semarang.
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

## 7. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga

---

<sup>7</sup>Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, Hal. 207.

dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui serta memahami isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Bank
  - 1. Pengertian Bank
  - 2. Jenis – jenis Bank
  - 3. Sumber Hukum Perbankan
  - 4. Prinsip Operasional Perbankan
  - 5. Usaha Bank
- B. Tinjauan Umum Tentang Kredit
  - 1. Pengertian Kredit
  - 2. Unsur – unsur Kredit

3. Prinsip-prinsip Kredit
  4. Jenis – jenis Kredit
  5. Fungsi dan Tujuan Kredit
- C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
  2. Unsur-unsur yang terdapat didalam perjanjian
  3. Asas-asas Hukum Perjanjian
  4. Jenis-jenis Perjanjian
  5. Syarat-syarat sahnya perjanjian
- D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit Bank
1. Pengertian Perjanjian Kredit Bank
  2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit Bank
  3. Prosedur atau cara memperoleh Kredit dari Bank
  4. Permasalahan Hukum yang terjadi akibat pemberian kredit oleh Bank
  5. Penyelesaian Bank terhadap Kredit Bermasalah
  6. Berakhirnya Perjanjian Kredit Bank
- E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku
1. Pengertian Perjanjian Baku
  2. Macam-macam Perjanjian Baku
  3. Klausul Eksonerasi Yang Terdapat Dalam Perjanjian Baku
  4. Pengujian Terhadap Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Baku



#### F. Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat
2. Landasan Kredit Usaha Rakyat
3. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat
4. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat

#### G. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kredit

1. Pengertian Asuransi Kredit
2. Tujuan Asuransi Kredit
3. Macam-macam Asuransi Kredit
4. Pengelolaan Asuransi Kredit
5. Perjanjian Asuransi Kredit

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

1. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Majenang Cabang Sragen dan upaya yang dilakukan BRI Unit Majenang dalam mengatasinya
2. Penyelesaian permasalahan kredit macet antara pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Majenang dengan pihak penjamin yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)

## B. PEMBAHASAN

1. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Majenang Cabang Sragen dan upaya yang dilakukan BRI Unit Majenang dalam mengatasinya
2. Penyelesaian permasalahan kredit macet antara pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Majenang dengan pihak penjamin yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)

## BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN